

PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) BAGI PENGEMBANGAN SOSIAL

Sodiq A. Kuntoro*

Abstract

Nonformal education activities are often implemented as practical education or training for the purpose to cope with economic problems of the individual learners. This economic orientation causes the other aspect of nonformal education aims such as social and cultural aspects are neglected. If nonformal education is considered in more wider as a mean for achieving the realization of lifelong education in society, the current emphasis of its purposes needed to enlarge. Nonformal education should not aimed to cope with economic problems only, but also to develop the social and cultural aspect of people life.

Keywords: nonformal education, long-life education, social aspect, PNF goals

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat akan pendidikan nonformal (PNF) sekarang ini semakin bertambah meningkat. Banyak faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan PNF dalam kehidupan masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi sangat cepat sekarang ini menyebabkan hasil pendidikan yang diperoleh di sekolah (pendidikan formal) menjadi tidak sesuai atau tertinggal dari tuntutan baru dalam dunia kerja. Ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah seolah-olah semakin cepat menjadi usang dan kurang dapat digunakan untuk memecahkan tantangan baru yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi semacam ini menuntut adanya layanan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah yang berfungsi sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan formal sering kurang dapat merespon bermacam-macam kebutuhan baru yang berkembang di masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga tuntutan layanan pendidikan nonformal sangat dibutuhkan.

Di samping itu terdapat fenomena banyaknya angka putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan satu jenjang pendidikan sekolah disebabkan karena beberapa alasan seperti keadaan ekonomi orang tua, ketidakcocokan siswa dengan kehidupan sekolah yang bersifat elitis, formalisme yang kaku dalam pola hubungan antara guru dan murid, kurikulum yang terasing dari kehidupan masyarakat. Siswa yang mengalami putus sekolah sering bukan sekedar mereka yang berlatar belakang ekonomi rendah, tetapi juga terdapat mereka yang berasal dari keluarga ekonomi mapan, tetapi mereka merasa tidak cocok atau merasa

terpenjara dalam sekolah, dan merasa bosan dengan formalisme dan rutinitas kehidupan sekolah. Fenomena siswa putus sekolah dapat terjadi di sekolah pedesaan maupun di perkotaan. Apabila kita mengharapkan mereka yang putus sekolah tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan, maka pendidikan nonformal sering menjadi alternatif layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Fenomena angka putus sekolah yang masih cukup besar diperparah dengan masih adanya warga masyarakat yang menderita buta aksara (membaca dan menulis) secara fungsional karena belum tuntasnya pencapaian pendidikan dasar bagi semua warga negara usia pendidikan dasar. Di sini tidak dapat ditampilkan data kuantitatif siswa yang putus sekolah dan mereka yang buta aksara fungsional, karena keterbatasan terhadap jangkauan perolehan data tersebut. Namun demikian, secara kualitatif adanya fenomena ini menunjukkan keprihatinan kita atas belum tuntasnya layanan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dilakukan oleh sekolah.

Pendidikan nonformal sekarang ini, dalam rangka membantu menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dilibatkan dalam layanan pendidikan program wajib belajar tersebut. Kemunculan program pendidikan kesetaraan dalam pendidikan nonformal yaitu program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, paket C setara SMA lebih dipicu oleh kebutuhan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Paket A dan Paket B) di samping memberi akses pendidikan yang lebih tinggi yaitu Paket C. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut:

* Dosen Universitas Negeri Yogyakarta

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dalam pengertian undang-undang ini program kesetaraan yang dilakukan oleh bidang pendidikan nonformal, dapat dimasukkan dalam fungsinya sebagai pengganti pendidikan formal, seolah-olah mereka yang tidak dapat mengikuti atau tidak menyelesaikan satu jenjang pendidikan formal dapat digantikan melalui program kesetaraan.

Program pendidikan nonformal adalah bermacam-macam. Pasal 26 ayat 3 menyebutkan beragam program pendidikan nonformal sebagai berikut:

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Bunyi ayat 3 ini tampaknya ingin menyebutkan satu persatu program layanan pendidikan yang termasuk bagian pendidikan nonformal. Tetapi tampaknya tidak dapat menyebut satu persatu secara tuntas, hal ini ditunjukkan bunyi bagian kalimat terakhir, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dengan demikian, terdapat peluang untuk memasukkan program layanan pendidikan nonformal lain yang masih belum disebut.

Pemahaman tentang cakupan kegiatan (layanan) pendidikan nonformal membutuhkan interpretasi yang luas, mungkin bukan sekedar apa yang sudah disebutkan pada ayat 3 tersebut di atas, sehingga dapat menyebutkan program layanan pendidikan nonformal lain. Lebih-lebih apabila fungsi pendidikan nonformal diletakkan sebagai bagian yang mendukung pendidikan sepanjang hayat maka banyak kegiatan pendidikan masyarakat yang dapat dimasukkan seperti pendidikan olahraga masyarakat, pendidikan rekreasi untuk mengisi waktu luang, bahkan pendidikan seni budaya masyarakat.

Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) membedakan pendidikan menjadi tiga pusat pendidikan yaitu: pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Tiga pusat pendidikan rumusan Ki Hajar Dewantara tersebut tampaknya diganti dengan istilah lain yaitu jalur pendidikan. Pasal 13 Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 menyebutkan:

Ayat 1, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ayat 2, pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pendidikan nonformal tampaknya dipandang identik dengan pendidikan masyarakat (konsep Ki Hajar Dewantara), tetapi sesungguhnya menurut pendapat saya terdapat nuansa, fungsi, dan orientasi yang berbeda. Pendidikan masyarakat memiliki bentuk

orientasi dan fungsi lebih luas. Bentuk pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat adalah bermacam-macam bukan hanya pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara sistematis, dengan tujuan dan kurikulum yang terstruktur. Di masyarakat masih banyak bentuk pendidikan lain yang sering tidak dirancang secara sistematis, yang terjadi secara alami menyatu dalam semua kegiatan kehidupan seperti kegiatan dalam pekerjaan, peristiwa seni budaya, olahraga, keagamaan,

Apabila pendidikan nonformal dipandang sebagai pendidikan masyarakat maka bentuk, tujuan, dan kegiatan pendidikan nonformal seharusnya menyentuh seluruh dimensi dari kehidupan masyarakat, sebagaimana konsep pendidikan sepanjang hayat yang menekankan bahwa seluruh aktivitas kehidupan dapat diartikan sebagai aktivitas belajar atau pendidikan.

semuanya mengandung arti pendidikan. Orientasi dan fungsi pendidikan masyarakat lebih luas daripada pendidikan nonformal yang selama ini menonjol yaitu fungsi kepelatihan teknikal untuk meningkatkan pendapatan. Fungsi pendidikan nonformal yang disebutkan dalam pasal 26 adalah sekedar sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Pasal ini mengesankan kurang memperhatikan fungsi integratif bagi pengembangan sosial budaya masyarakat, yang seharusnya menjadi peran penting juga bagi peran pendidikan nonformal.

Pertanyaannya adalah bagaimana para pengambil kebijakan seperti Direktorat Pendidikan Nonformal dan direktorat lain dalam Dirjen PNF melakukan interpretasi dalam mengembangkan

programnya, atas dasar bunyi pasal yang terkait dengan PNF sebagaimana tersebut di atas. Apabila pendidikan nonformal dipandang sebagai pendidikan masyarakat maka bentuk, tujuan, dan kegiatan pendidikan nonformal seharusnya menyentuh seluruh

dimensi dari kehidupan masyarakat, sebagaimana konsep pendidikan sepanjang hayat yang menekankan bahwa seluruh aktivitas kehidupan dapat diartikan sebagai aktivitas belajar atau pendidikan.

PEMBAHASAN

Fungsi Pengembangan Personal dan Sosial

Terdapat kecenderungan di negara kita peran pendidikan nonformal lebih ditekankan pada pendidikan keterampilan teknis dengan tujuan peningkatan ekonomi atau pendapatan warga masyarakat. Seolah-olah orientasi pendidikan nonformal ditujukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi peningkatan pendapatan peserta belajar. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, atau program kursus keterampilan lebih banyak berkembang dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Bahkan program keaksaraan fungsional, program Paket A, Paket B, dan Paket C memberikan keterampilan fungsional yang terkait dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan warga belajarnya. Program keaksaraan fungsional memberikan kemampuan membaca dan menulis yang dikaitkan dengan keterampilan ekonomis untuk peningkatan pendapatan.

Orientasi pendidikan nonformal pada peningkatan kemampuan kerja, dan keterampilan bagi peningkatan pendapatan menggambarkan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat yang bersifat jangka pendek dan mendesak. Banyaknya kebutuhan untuk memperoleh pekerjaan dan peningkatan pendapatan warga masyarakat mendorong program pendidikan nonformal lebih diarahkan pada pendidikan ketenagakerjaan dan tujuan ekonomi. Karena itu program pendidikan nonformal yang berorientasi pada tujuan pengembangan integritas personal dan sosial budaya kurang memperoleh perhatian.

Sebenarnya pendidikan nonformal memiliki peran besar sebagai agen bagi pengembangan personal dan sosial (transformasi sosial). Setiap orang (individu) selalu hidup dalam konteks dengan kelompok masyarakat, di mana mereka hidup. Pendidikan yang dipengaruhi pandangan *progresivisme* melihat tujuan pendidikan bersifat ganda yaitu peningkatan

pengembangan diri individu dan sekaligus peningkatan kehidupan sosial yang lebih baik.

Hellenbeck seorang ahli pendidikan orang dewasa mengatakan bahwa peserta belajar sebagai individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Walaupun perhatian utama pendidikan orang dewasa adalah membantu individu tumbuh dan berkembang tetapi apa yang mereka inginkan untuk dipelajari selalu merupakan hasil dari lingkungan di mana mereka hidup. Minat mereka, kebutuhannya, permasalahannya, dan keinginannya adalah hasil dari lingkungannya.

(Darkenwald dan Merriam, 1982, 50). Apabila tujuan pendidikan nonformal adalah pengembangan peserta belajar sebagai individu dan kelompok sosial di mana peserta belajar itu hidup maka kurikulum pendidikan non-formal, peran tutor dan peserta belajar, dan proses pembelajarannya harus berfungsi untuk mencapai kemajuan individu dan kelompok sosialnya.

Terdapat kecenderungan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja atau program

kursus keterampilan, program keterampilan fungsional yang terkait dengan Paket A, Paket B, dan Paket C, atau program keaksaraan fungsional lebih diarahkan pada peningkatan perolehan pendapatan dan diarahkan bagi warga belajar sebagai individu. Dapat dikatakan peran pendidikan nonformal sebagai agen perubahan sosial masih kurang diperhatikan. Apabila kita memperhatikan kurikulum dan proses pembelajaran program kursus keterampilan misalnya: kursus stir mobil maka yang berkembang adalah sekedar diberikan pengetahuan dan keterampilan teknis yang terkait dengan kemampuan individu mengoperasikan dan menjalankan mobil di jalan. Sikap dan nilai-nilai sosial budaya yang dibutuhkan untuk turut membantu tertib lalu lintas, penghargaan pada peraturan, dan menghormati pengguna layanan angkutan atau pengguna jalan kurang diperhatikan. Akibat yang terjadi

Kemampuan teknis yang dikuasai individu sebenarnya tidak mungkin dapat digunakan dengan baik tanpa didukung oleh faktor nilai sosial budaya dan sikap psikologis. Individu selalu hidup dalam konteks nilai sosial budaya yang diperlukan bagi pengaturan ketertiban kehidupan dan aktivitas kerja yang dapat menyenangkan dan membahagiakan.

adalah problem kemacetan jalan dan kecelakaan lalu lintas sering terjadi.

Peran pendidikan nonformal yang menonjolkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan perolehan ekonomi jangka pendek kurang dapat membantu pemecahan problem sosial seperti digambarkan di atas. Terdapat kelemahan orientasi pendidikan nonformal semacam ini, di samping adanya kelebihan. Kelemahan mendasar yang muncul adalah kurangnya penghargaan faktor sosial budaya sebagai kapital bagi pengembangan masyarakat. Faktor sosial budaya sebagai perekat kehidupan kurang memperoleh perhatian dalam program pendidikan nonformal. Padahal faktor sosial budaya adalah merupakan faktor fundamental bagi berkembangnya nilai-nilai luhur yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas kerja yang produktif. Kemampuan teknikal yang dikuasai individu sebenarnya tidak mungkin dapat digunakan dengan baik tanpa didukung oleh faktor nilai sosial budaya dan sikap psikologis. Individu selalu hidup dalam konteks nilai sosial budaya yang diperlukan bagi pengaturan ketertiban kehidupan dan aktivitas kerja yang dapat menyenangkan dan membahagiakan.

Apabila kita bersedia melihat atau belajar dari negara lain, menurut pendapat saya model pendidikan nonformal dalam kerangka mendukung pendidikan sepanjang hayat di Jepang dapat dijadikan bahan perbandingan yang baik sekali. Di masyarakat Jepang pendidikan nonformal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat tidak terlalu ditonjolkan pada pendidikan tenaga kerja untuk tujuan perolehan ekonomi. Walaupun kita tahu bahwa di masyarakat Jepang mempunyai sistem pendidikan sumberdaya manusia yang sangat andal sehingga dapat mendukung peningkatan sumberdaya manusia bagi kemajuan industrinya. Bagi masyarakat Jepang pengembangan pendidikan nonformal diarahkan untuk mendukung terbentuknya masyarakat belajar (*learning society*).

Beragam-macam aktivitas budaya dan olahraga lebih dihargai dan dinikmati masyarakat dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari, mengisi waktu luang, memenuhi rasa ingin tahu intelektual, dan memperoleh kegembiraan. Bahkan bagi masyarakat Jepang memiliki rasa malu untuk mengaitkan pendidikan nonformal dengan tujuan peningkatan tenaga kerja bagi perolehan ekonomi.

Sebagaimana di depan telah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan orang dewasa adalah selalu memiliki dimensi ganda yaitu bagi peningkatan kemampuan personal dan perbaikan kehidupan sosial. Program pendidikan nonformal seharusnya memperhatikan kurikulumnya, peran tutor dan peserta belajarnya, serta proses pembelajarannya agar dapat berfungsi untuk mencapai kemajuan personal warga belajar dan kemajuan sosial di mana mereka hidup. Dalam kurikulum pendidikan program kursus menjahit (misalnya) tidak cukup hanya apabila peserta belajar sekedar belajar tentang teknik menjahit yang baik, tetapi mereka perlu belajar memahami aspek sosial budaya. Pekerjaan menjahit juga memiliki peran sosial bagi pemenuhan kebutuhan lingkungan masyarakat, dan juga memiliki peran kebudayaan yaitu memelihara dan mengembangkan desain pakaian yang menjadi kebanggaan budaya masyarakatnya. Peran tutor dan mahasiswa seharusnya bukan sekedar mengembangkan kemampuan teknik saja, tetapi juga berperan bagi pengembangan sikap psikologis, nilai-nilai kehidupan (kejujuran, kerja keras, kesopanan, pengabdian) maupun nilai budaya seperti penghargaan terhadap tradisi budaya. Sedangkan proses pembelajaran pendidikan nonformal bukan sekedar kepelatihan keterampilan teknik yang sempit, tetapi juga perlu proses diskusi atau refleksi tentang keterampilan teknis tersebut keterkaitannya dengan kehidupan sosial yang lebih luas.

PENUTUP

Sesuai dengan bunyi Pasal 26 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat memiliki dua dimensi, yaitu pertama dimensi vertikal bahwa pendidikan berjalan sepanjang rentang kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal. Setiap tahap perkembangan hidup manusia

membutuhkan pendidikan dengan bentuk dan tujuan yang berbeda-beda. Kedua adalah dimensi horizontal bahwa pendidikan terjadi dalam bentuk bermacam, tidak hanya terbatas pada persekolahan, tetapi bermacam kegiatan kehidupan dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai aktivitas pendidikan, seperti aktivitas dalam pekerjaan, keagamaan, rekreasi, kebudayaan, dan keluarga. Apabila konsep pendidikan sepanjang hidup ini diaplikasikan pada sistem pendidikan nasional, maka diperlukan adanya perubahan pada kegiatan pendidikan formal, nonformal,

dan informal yang selama ini berjalan seolah-olah dengan sekat pembatas yang kaku.

Pendidikan nonformal seharusnya juga mengambil prinsip-prinsip pendidikan sepanjang hayat, sehingga tidak terlalu kaku dalam pengembang program layanan, bagi pemenuhan kebutuhan warga masyarakat. Filosofi pendidikan sepanjang hayat yang sangat menonjol adalah bahwa semua aktivitas kehidupan dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai aktivitas pendidikan. Pendidikan nonformal yang dipahami secara sempit, tidak akan dapat memasukkan kegiatan pendidikan di masyarakat yang luas, seperti peristiwa keagamaan, sosial budaya, seni atau olahraga sebagai kegiatan pendidikan nonformal. Sementara pendidikan informal dipahami sebagai kegiatan pendidikan yang terjadi dalam keluarga, sedang pendidikan dalam masyarakat yang bermacam-macam bentuk tidak semuanya dapat dimasukkan dalam pendidikan nonformal.

Oleh karenanya diperlukan interpretasi yang lebih fleksibel dalam memahami cakupan pendidikan nonformal. Bentuk-bentuk pendidikan yang berkembang dimasyarakat melalui kegiatan keagamaan, kebudayaan, rekreasi, atau olahraga memberikan sumbangan terhadap peningkatan pengetahuan,

keterampilan, nilai-nilai, atau sikap pada warga masyarakat. Pendidikan nonformal dalam rangka pendukung pendidikan sepanjang hayat dan mendukung terciptanya "*learning society*" membutuhkan perubahan konsep, kegiatan, kurikulum, proses pembelajaran, peran tutor, dan peserta belajar.

Pendidikan nonformal yang menonjolkan pada kegiatan yang berorientasi pada kepelatihan kerja dalam rangka pencapaian peningkatan pendapatan kurang dapat memberi peluang bagi pelaksanaan pendidikan nonformal yang mendukung pendidikan sepanjang hayat dan terbentuknya masyarakat belajar. Orientasi pendidikan nonformal perlu diperluas pada aspek personal dan sosial, sehingga manfaat pendidikan nonformal bukan sekedar bersifat ekonomis, tetapi juga mencakup pengembangan diri, intelektual, sosial, budaya. Makna pendidikan nonformal mencakup keduanya bagi individu (peserta pendidikan) dan kelompok sosial di mana individu berada di suatu masyarakat. Peran tutor dan peserta pendidikan nonformal seharusnya memasukkan pengembangan sikap psikologis dan nilai-nilai. Proses pembelajar perlu mengembangkan proses diskusi atau refleksi keterkaitan keterampilan teknik dengan kehidupan sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Darkenwald, G. G., & Merriam, S. B. (1982). *Adult education: Foundation of practice*. New York: Harper & Row, Publishers.
- Okamoto, K. (1994). *Lifelong learning movement in Japan: Strategy, practices, and challenges*. Japan Ministry of Education, Science and Culture.
- Putri, M. S. (Presiden Republik Indonesia). (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Unesco House. (1972). *Interdisciplinary symposium on life-long education (Report)*. Paris.